



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AKMALUL FIRDAUS
2. Jabatan : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
3. NHK : 440514

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.320.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA PAMEKASAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA PAMEKASAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 202 m2/150 m2 di KAB / KOTA PAMEKASAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA PAMEKASAN, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/189 m2 di KAB / KOTA PAMEKASAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 121.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV RD52WD.2.0MT Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA K1H02M14LO A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA EIF02N24M2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 673.755.686

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.114.755.686



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.114.755.686

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.